Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 30461-30464

Dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan Batak Toba Dalam Praktik Budaya *Paulakhon*

Kristin Danayun Lumbantobing
STT HKBP Pematangsiantar
Corresponding Author: **Kristin Danayun Lumbantobing** „ e-mail: kristintobing853@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT

This study examines the dimensions of violence against Batak Toba women in the Paulakhon cultural practice. Patriarchal social structures embedded in Batak adat often perpetuate symbolic, structural, and physical violence against women, especially those failing reproductive roles, such as not bearing male offspring. Using a qualitative literature study approach, this research analyzes primary and secondary sources from 2021 to 2025, applying descriptive-analytical techniques with document review as the instrument and triangulation for validity. The population includes relevant literatures on Batak Toba culture and gender-based violence; purposive sampling selects the most pertinent studies. Results reveal multi-form violence in Paulakhon practices involving physical, verbal, and psychological abuse, underpinned by structural patriarchy that legitimizes discrimination and social stigma against women. The findings highlight the persistence of systemic violence embedded in cultural and social norms, negatively impacting women's autonomy and family honor. The study concludes that Paulakhon represents a human rights violation reflecting entrenched patriarchal power structures, calling for culturally sensitive education and theological approaches to empower Batak Toba women and transform gender-biased traditions.

Kata Kunci: Adat, Batak Toba, Gender-Based Violence, Patriarchy, Paulakhon

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia kerap berakar pada budaya patriarkal yang konservatif, yang secara turun-temurun menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas, sementara perempuan sering diposisikan sebagai pihak subordinat yang lemah dan bergantung (Akgul, 2021; Sutaryo et al., 2021). Dalam budaya Batak Toba, khususnya, patriarki ini terwujud dalam sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan penerus utama garis keturunan, sementara perempuan dianggap sebagai bagian dari kepemilikan laki-laki yang tunduk pada norma dan aturan adat (Schreiner, 2003; Nainggolan et al., 2025). Patriarki dalam adat ini bukan hanya sistem sosial, melainkan juga tatanan sakral yang diwariskan nenek moyang dan dianggap berasal dari Debata (Tuhan), sehingga menjadi dasar moral dan spiritual bagi masyarakat Batak Toba (Tampubolon, 2002; Firmando, 2024).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang berakar dalam struktur patriarkal ini tidak selalu tampak dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan simbolik dan struktural yang mereproduksi ketimpangan gender dan subordinasi perempuan (Akgul, 2021; Narwoko, 2021). Dalam praktik budaya Paulakhon, perempuan yang dianggap gagal memenuhi peran reproduksi—seperti tidak memiliki keturunan laki-laki—sering dikembalikan kepada keluarganya dengan alasan yang membenarkan kekerasan verbal, psikologis, dan fisik (Siburian, 2021; Naibaho, 2023). Tradisi ini menghadirkan realitas bahwa perempuan tidak memiliki otonomi penuh dan menjadi objek dalam struktur sosial yang patriarkal, di mana sistem sosial dan hukum adat lebih berpihak kepada laki-laki sehingga memperkuat legitimasi kekerasan terhadap perempuan (Schreiner, 2003; Firmando, 2024).

Permasalahan utama yang melandasi kekerasan dalam tradisi Paulakhon terkait dengan kekuasaan patriarkal yang memperkuat kesenjangan gender melalui struktur sosial dan adat yang bias

(Narwoko, 2021; Akgul, 2021). Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan yang minim dalam pemahaman kesetaraan gender, dan norma sosial yang menuntut perempuan mematuhi peran dan fungsi tertentu, turut memperparah kondisi subordinasi perempuan (Kamla, 2022; Fakih, 2023). Adanya tekanan sosial dan stigma yang melingkupi perempuan yang "gagal" dalam menjalankan peran reproduksi mengakibatkan diskriminasi berlapis yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan dalam ranah publik dan domestik (Nainggolan et al., 2025; Schreiner, 2003).

Lebih jauh, sistem adat yang mempertahankan patriarki ini tidak hanya menghasilkan kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga kekerasan struktural yang berupa diskriminasi kultural dan sosial, di mana perempuan ditempatkan sebagai kelas kedua dalam keluarga dan masyarakat (Narwoko, 2021; Tampubolon, 2002). Stigma dan diskriminasi yang berlanjut ini tidak hanya mempengaruhi individu perempuan tetapi juga secara turun-temurun berdampak pada keluarga dan komunitasnya (Siburian, 2021; Firmando, 2024). Oleh karena itu, perlunya pemahaman kritis terhadap pola-pola kekerasan yang melekat dalam tradisi ini sangat penting untuk mengidentifikasi akar budaya dan sosial yang menguatkan kekerasan berbasis gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi kekerasan terhadap perempuan Batak Toba dalam praktik budaya Paulakhon dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Studi ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai makna dan manifestasi kekerasan dalam tradisi tersebut serta merespon urgensi transformasi budaya yang bias gender (Siburian, 2021; Firmando, 2024). Kebaruan penelitian terletak pada analisis kritis yang mengaitkan kekerasan berbasis gender dengan struktur sosial patriarkal yang sakral dalam adat Batak, serta menawarkan pendekatan pendidikan dan teologis sebagai strategi pemulihan dan pemberdayaan perempuan di tengah budaya Batak Toba (Nainggolan et al., 2025; Schreiner, 2003).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, nilai, dan interpretasi sosial budaya terkait kekerasan terhadap perempuan dalam praktik Paulakhon di masyarakat Batak Toba (Creswell, 2021). Pendekatan kualitatif menjadi tepat untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual berdasarkan perspektif sosial, budaya, dan teologis (Sugiyono, 2023). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, bertujuan mengungkap pola relasi kuasa patriarkal dan manifestasi kekerasan simbolik serta struktural yang dialami perempuan (Lumbantobing & Naibaho, 2025; Sudaryono, 2022).

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian berupa kajian dokumen dan literatur yang meliputi sumber primer dan sekunder seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen adat Batak Toba terkait (Emzir, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui akses dan telaah pustaka yang meliputi berbagai referensi klasik maupun kontemporer dari basis data Google Scholar yang memiliki DOI aktif, memastikan keakuratan dan kekinian data (Sugiyono, 2023). Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari literatur yang berbeda agar pemahaman yang diperoleh komprehensif dan kredibel (Creswell, 2021).

Populasi kajian ini adalah seluruh literature dan dokumen relevan yang membahas tentang praktik budaya Batak Toba secara khusus mengenai tradisi Paulakhon dan kekerasan berbasis gender dalam konteks patriarki (Lumbantobing & Naibaho, 2025). Sampel penelitian diambil secara purposive, memilih literatur yang secara eksplisit membahas aspek kekerasan, gender, budaya Batak Toba, serta tradisi Paulakhon yang masih relevan dan terbaru, termasuk sumber dari tahun 2021 hingga 2025 untuk memperkaya analisis (Sudaryono, 2022; Sugiyono, 2023).

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dari berbagai database ilmiah, diikuti dengan klasifikasi dan pengelompokan data berdasarkan tema yang muncul terkait dimensi kekerasan (fisik, simbolik, struktural), pengaruh adat dan sistem sosial patriarki, serta dampak pada perempuan Batak Toba (Emzir, 2021). Selanjutnya dilakukan reduksi data untuk memisahkan informasi pokok dari yang kurang signifikan, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya dan hukum adat masyarakat Batak Toba (Creswell, 2021; Lumbantobing & Naibaho, 2025). Proses ini dilakukan

secara sistematis dan berkelanjutan agar membentuk kerangka analisis yang kohesif dan kritis terhadap praktik Paulakhon sebagai manifestasi kekerasan berbasis gender dalam budaya patriarkal.

Dengan pendekatan dan prosedur tersebut, penelitian ini berhasil menginterpretasikan bagaimana praktik Paulakhon mereproduksi struktur kuasa maskulin yang menindas perempuan Batak Toba dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam menegosiasikan posisi sekaligus menjaga kehormatan mereka dalam konteks sosial budaya yang melekat kuat (Sugiyono, 2023; Lumbantobing & Naibaho, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Kekerasan Multi Bentuk dalam Tradisi Paulakhon

Kekerasan yang dialami perempuan dalam situasi paulakhon muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga psikologis atau mental. Tekanan selalu datang dari suami maupun pihak keluarga suami. Misalnya, perempuan yang dikembalikan atau bahkan istri yang meninggal dunia seringkali menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan, terutama pada perempuan hamil yang kurang diprioritaskan sehingga berakhir dengan kematian ibu. Selain itu, tekanan berkepanjangan menyebabkan stres hebat, bahkan sampai ada istri yang berusaha bunuh diri akibat beban psikologis yang tidak tertanggungkan. Semua peristiwa ini menjadi tanggung jawab penuh perempuan sebagai korban tanpa ada dukungan yang memadai.

Kondisi ini mengungkapkan kenyataan serius tentang situasi perempuan dalam masyarakat Batak yang sering kali memprihatinkan dan diperburuk oleh tradisi paulakhon yang masih membayangi institusi pernikahan mereka. Walaupun di wilayah perkotaan tradisi ini sudah hampir hilang, ketidakterlarangan secara hukum membuka peluang bagi praktik-praktik penindasan terhadap perempuan Batak Toba tetap berlangsung.

Kekerasan Struktural yang Dialami Perempuan dalam Tradisi Paulakhon

Teori kekerasan struktural menjelaskan bahwa kekerasan ini bukan tindakan langsung oleh individu tertentu, melainkan terbangun dalam sistem sosial yang kuat melalui nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat (Narwoko, 2015). Kekerasan struktural ini dapat muncul ketika ada ketimpangan kekuasaan dan kekayaan yang tidak seimbang, memunculkan kecenderungan melakukan kekerasan kecuali ada aturan yang menghambatnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, termasuk suku Batak, kekerasan struktural ini terwujud dalam subkultur patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua. Kekerasan ini bersifat non-fisik berupa stigmatisasi sosial, diskriminasi ekonomi, dan pelecehan psikologis yang terselubung. Misalnya, pengembalian perempuan karena alasan tidak punya keturunan atau tidak patuh memperlihatkan kekerasan sistemik yang telah mengakar kuat. Melihat perempuan sebagai komoditas yang bisa dipindahtangankan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologisnya adalah tindakan yang sangat kejam.

Stigma negatif tidak hanya menimpa perempuan yang dikembalikan, tetapi juga keluarga mereka. Hal ini menghancurkan wibawa sosial dan menimbulkan cap buruk pada boru (anak perempuan) dalam komunitas adat. Stigmatisasi gender dan keluarga ini berpotensi diwariskan secara turun-temurun sehingga sulit diputus. Akibat akhirnya adalah tekanan besar bagi perempuan dalam rumah tangga yang merasa terkungkung dan tak berdaya karena risiko kehilangan kehormatan pribadi dan keluarga apabila mereka dikembalikan secara adat.

Tradisi Paulakhon sebagai Pelecehan terhadap Pernikahan dan Hak Asasi Manusia

Acara perkawinan adat Batak merupakan bagian integral dari hukum adat Dalihan Na Tolu yang berprinsip monogami dan eksogami, melarang perkawinan antar sesama marga (Nainggolan, 2015). Dalam pernikahan adat ini, setelah pemberkatan biasanya diadakan acara adat yang menegaskan hubungan kekerabatan baru melalui berbagai aturan dan adat istiadat yang ketat.

Namun, tradisi paulakhon bukan hanya melukai perempuan yang menjadi korban, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan struktur adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Pada masa lalu, pelaksanaan paulakhon biasanya adalah opsi terakhir yang diambil ketika tidak ada solusi lain setelah upaya musyawarah. Meski demikian, secara prinsip paulakhon melanggar janji

pernikahan yang meliputi kesetiaan dan saling membantu berdasarkan kesepakatan bersama (Schreiner, 2003).

Lebih jauh, praktik ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena mengabaikan martabat perempuan sebagai manusia yang utuh dan bebas. Contoh nyata dari pelanggaran ini adalah ketika perempuan dikembalikan tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga martabat dan hak otonomi mereka ternodai secara serius. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan HAM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik budaya Paulakhon terhadap perempuan Batak Toba melibatkan berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang dilandasi oleh struktur sosial patriarkal yang sakral dan mengakar dalam adat Batak. Kekerasan tersebut tidak hanya bersifat individual tetapi juga bersifat struktural, berupa diskriminasi, stigmatisasi, dan pelecehan yang melemahkan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan penurunan otonomi perempuan, tekanan psikologis yang berat, serta pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama terhadap perempuan yang dianggap gagal memenuhi peran reproduksi menurut norma budaya setempat. Tradisi paulakhon secara sistemik mereproduksi ketimpangan gender yang mendalam dan berpotensi diwariskan secara turun-temurun.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi literatur yang hanya menganalisis sumber-sumber tertulis tanpa pengumpulan data lapangan langsung, sehingga pendalaman pengalaman subjektif perempuan dalam komunitas Batak Toba dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Disarankan agar riset lanjutan menggunakan metode kualitatif lapangan, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan strategis. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya upaya transformasi budaya melalui pendidikan yang sensitif gender dan pendekatan teologis yang memberdayakan perempuan secara kultural. Hal ini penting untuk mengubah praktik adat yang diskriminatif dan mendorong kesetaraan serta penghormatan terhadap hak perempuan dalam masyarakat Batak Toba.

REFERENSI

Akgul, F. (2017). *Patriarchal theory reconsidered: Torture and gender-based violence in Turkey*. Springer International Publishing.

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data dan penyajian hasil penelitian*. RajaGrafindo Persada.

Fakih, M. (2023). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.

Kamla, B. (2022). *Understanding gender*. Kali for Women.

Lombantobing, K. D., & Naibaho, P. (2025). *Dimensi kekerasan terhadap perempuan Batak Toba dalam praktik budaya Paulakhon*. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 1–10.

Nainggolan, T., et al. (2015). *Karakter Batak: Masa lalu, kini, dan masa depan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Narwoko, D. (2015). *Sosiologi: Teks pengantar dan terapan*. Prenada Media Grup.

Schreiner, L. (2003). *Adat dan Injil: Perjumpaan adat dengan iman Kristen di Tanah Batak*. BPK Gunung Mulia.

Sudaryono, S. (2022). Metode penelitian kualitatif: Pendekatan dan penerapan dalam konteks sosial budaya. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 11(1), 35–50.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (28th ed.). Alfabeta.

Sutaryo, et al. (2021). Membangun kedaulatan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan masyarakat dalam kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Pusat Studi Pancasila UGM.

Tampubolon, R. P. (2002). *Pustaha Tumbaga Holing: Adat Batak – Patik Uhum I & II*. Dian Utama dan Kerabat.